

**JURNAL HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAS EKSPLOITASI ANAK  
SEBAGAI PENGEMIS DI JALAN**



**Diajukan oleh:**

**Issabella Marchelina**

**NPM : 160512282**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAS EKSPLOITASI  
ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI JALAN**



**Diajukan oleh :  
Issabella Marchelina**

**NPM : 160512282  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal: 22 Januari 2020  
Dosen Pembimbing**

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAS EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI JALAN**

**Issabella Marchelina**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [issabellamarchelina.im@gmail.com](mailto:issabellamarchelina.im@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Every child has basic rights that needs to be protected. Parents have obligations and responsibilities to protect and fulfil those basic rights. Parents often make their children as a source to gain materialistic benefits. A research with the title "Criminal Liability of Parents and Child Exploitation as Beggars on The Streets" aims to know how criminal liabilities to parents that exploit their children. This research is an normative law research which data was gathered through literature review and interviews with interviewees. The result from this research is parents can be held responsible criminally if proven guilty, but practical cases of child exploitation often are not dealt through the legal way. Case resolution to child exploitation is not fully right with provisions of the law yet. The form of criminal liability to parents that does child exploitation is limited with a solution of non legal channels by sending the parents to rehabilitation. All parties that are involved such as the government or the community has to socialize to the whole community of Indonesia, so understanding about child exploitation and raising the awareness to childrens that have been a victim of it.*

**Keywords:** *Criminal liability, Child exploitation, Beggars.*

## **1. PENDAHULUAN**

Anak adalah sosok yang terlahir dari rahim seorang ibu dan dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang (UU) yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keberadaan anak di dunia ini tentunya membawa kebahagiaan bagi setiap keluarga yang dianugerahi seorang anak sehingga sudah sepatutnya sebagai keluarga terutama orang tua harus menyayangi, melindungi, merawat, mendidik, dan menjaga anak tersebut hingga ia dewasa. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang dianggap sebagai pihak yang sangat berperan penting bagi perkembangan fisik maupun mental seorang anak dan memiliki kewajiban untuk

melindungi anaknya dari risiko masalah sosial yang akan muncul. Seorang anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak dan kewajibannya agar anak tersebut dapat bertumbuh, berkembang, dan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang tua untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap perbuatan diatur dalam serangkaian peraturan mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan agar segala aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Serangkaian peraturan itu biasa disebut dengan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak khususnya perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam UU tersebut telah diatur mengenai tanggung jawab orang tua dan disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain UU yang telah disebutkan di atas, terdapat UU yang masih berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dan hak seorang anak. Adapun UU tersebut adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai anak dan hak-hak seorang anak. Tidak ketinggalan pula disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Fakta yang sebenarnya terjadi di negara ini adalah tidak sedikit kasus yang menimpa anak-anak disebabkan karena perlakuan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab di mana anak dijadikan korban atas tindakan orang tuanya sendiri. Kebanyakan dari orang tua tersebut tidak memperdulikan akan perkembangan mental dan fisik anak itu.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) DIY di dalam laporan hasil pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2017, jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 101 anak.<sup>1</sup> Perlindungan khusus diberikan salah satunya kepada anak yang dieksploitasi

secara ekonomi. Kasus yang sering menimpa anak adalah kasus eksploitasi anak. Meskipun macam-macam eksploitasi anak itu beragam, namun yang paling sering kita temukan adalah eksploitasi anak secara ekonomi di mana orang tua rela menjadikan mereka sebagai pengemis di jalanan demi keuntungan orang tua atau orang lain tersebut. Hal seperti ini seringkali kita jumpai di jalan-jalan. Padahal tindakan eksploitasi anak secara ekonomi sudah jelas merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan karena hal tersebut melanggar hukum.

Salah satu faktor penyebab orang tua mengeksploitasi anaknya adalah karena mereka tidak paham bahwa perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kurangnya pemahaman mengenai hak anak dan tanggung jawab orang tua menjadi alasan mengapa perlindungan hukum terhadap anak perlu ditegaskan dan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melanggar perlu ditegaskan pula.

Kasus eksploitasi anak secara ekonomi tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat karena mayoritas pelaku eksploitasi anak biasanya adalah orang tua anak itu sendiri, padahal dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Mengutip dari salah satu media massa yang berisi tentang adanya kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya lagi-lagi kembali terjadi di negeri ini. Menurut keterangan dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), seorang buruh lepas menyuruh anak

---

<sup>1</sup> Dena Kurnia Sari, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengemis Dengan Membawa Bayi/Anak-Anak Di Bawah Umur Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 51.

perempuannya yang masih duduk di bangku kelas 3 SD menjadi pengemis. Ditanya mengenai motif dasarnya, pelaku menjawab karena alasan ekonomi sekaligus ingin memanfaatkan momentum bulan ramadhan agar warga yang beragama muslim mau menyumbangkan hartanya kepada anaknya yang masih di bawah umur. Di samping itu, pelaku yang bekerja sebagai buruh harian lepas juga sedang terlilit utang. Pelaku menjadikan anaknya pengemis mulai pukul 17.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita di sekitar pelataran lampu merah Kota Makassar hingga akhirnya kasus ini dapat terungkap oleh polisi yang berawal ketika polisi sedang melakukan patroli di sekitar lampu merah di Makassar pada malam hari.<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum selama ini dirasa masih kurang tegas dalam menindaklanjuti orang tua yang terlibat kasus eksploitasi anak khususnya secara ekonomi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang menjadikan anaknya sebagai pengemis demi keuntungannya sendiri. Masih banyak orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis seolah-olah lari dari tanggung jawabnya secara pidana.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang digunakan, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder yang digunakan antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengenai bentuk dan kedaulatan; Pasal 28 B ayat (2) mengenai hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) mengenai hak anak atas perlindungan oleh orang tua; Pasal 58 ayat (1) mengenai hak anak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental; Pasal 64 mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua; Pasal 59 ayat (2) huruf d mengenai perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi; Pasal 76I mengenai larangan melakukan eksploitasi secara ekonomi; Pasal 88 mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 76I.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

---

<sup>2</sup><https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/19321651/seorang-ayah-di-makassar-ditangkarena-jadikan-anaknya-pengemis-ap->, diakses 22 Agustus 2019, pukul 16.57 WIB.

7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) sampai (4) mengenai hak-hak anak; Pasal 9 mengenai tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak.

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian pengemis.

9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

10) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Pasal 6 mengenai kriteria pengemis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

Karya ilmiah dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan, ini menggunakan cara pengumpulan data dengan menggunakan metode:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui dua (2) narasumber yaitu Bapak F.X. Heru Santoso, S.H, M.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Slemann dan Bapak Pranawa, S.H, selaku advokat Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dengan menggunakan daftar pertanyaan

yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif adalah sebagai berikut:

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal. Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia perihal hak anak untuk dilindungi dari kegiatan eksploitasi dengan Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perihal perlindungan khusus

diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikaji karena peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
  - a) Gramatikal adalah penafsiran yang berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.
  - b) Sistematis adalah penafsiran dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.
  - c) Teleologis adalah penafsiran dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut.

#### 5) Menilai hukum positif

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam bahan hukum primer yang merupakan gagasan ideal tentang Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti yaitu

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Atas Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Jalan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak F.X. Heru Santoso, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Bapak Pranawa, S.H, selaku advokat pada Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta mengatakan bahwa latar belakang didirikannya Lembaga Perlindungan Anak berawal saat Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Setelah adanya Konvensi Hak Anak, Indonesia mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang berada di tiap provinsi melalui Departemen Sosial. Keberlangsungan Lembaga Perlindungan Anak ini diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah hingga saat ini. Hal ini menyebabkan ada beberapa Lembaga Perlindungan Anak yang tidak berjalan dikarenakan kurangnya *support* atau dukungan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing, namun tidak untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sampai saat ini Lembaga Perlindungan Anak masih tetap eksis. Masih eksisnya Lembaga Perlindungan Anak di Yogyakarta inilah yang menjadi pertimbangan untuk tidak dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena jika dibentuk KPAI maka tentu akan menambah anggaran yang lebih besar dari pada dana yang sudah diberikan kepada Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta.

Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta sebagai lembaga yang bernaung dalam memberi perlindungan bagi anak tentunya mempunyai peran

tersendiri. Di dalam kasus eksploitasi anak, peran Lembaga Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual yang mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diatur bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi haruslah diberi perlindungan khusus dan dalam hal memberi perlindungan itu merupakan kewajiban dari pemerintah atau lembaga yang berwenang.

Kasus eksploitasi anak di Yogyakarta sebenarnya tidak terlalu banyak muncul mungkin karena masyarakat sendiri masih banyak yang belum paham mengenai eksploitasi terhadap anak itu seperti apa sehingga mereka yang apabila melihat kejadian anak yang dieksploitasi, mereka tidak bereaksi apapun atau mungkin disebabkan karena tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Rata-rata kasus eksploitasi yang dilakukan adalah eksploitasi secara ekonomi kepada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Contohnya seperti anak yang dijadikan pengemis di jalan atau dijadikan penjual barang ataupun korban. Saat ini ruang gerak untuk melakukan eksploitasi di tempat umum sebenarnya semakin sempit karena pihak Pemerintah Daerah rutin melakukan razia terhadap mereka yang melakukan pengemisan di jalan atau tempat umum, namun hal itu tidak membuat para pelaku menghentikan aksinya.

Melihat adanya pengaduan mengenai kasus eksploitasi anak secara ekonomi tentu Lembaga Perlindungan Anak tidak diam saja. Lembaga Perlindungan Anak sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini tentu melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga

Perlindungan Anak tentunya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar maupun kepada aparat penegak hukum atau perangkat wilayah di tingkat bawah seperti RT, RW, dan kelurahan dengan harapan mereka bisa mengendalikan agar di lingkungan mereka tidak terjadi kasus-kasus eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini rentan terjadi pelacuran anak secara *online*. Penanganan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, aspek medis, dan aspek sosial. Ditinjau dari aspek yuridis, penanganan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak yaitu berupa pendampingan korban ke ranah hukum dalam hal korban melakukan pelaporan ke polisi dan pendampingan dilakukan sampai proses di pengadilan. Kedua, ditinjau dari aspek psikologis yaitu berupa pendampingan korban dalam melakukan pemeriksaan psikolog bilamana perbuatan yang menimpa korban berdampak ke perilaku yang tidak wajar, misalnya depresi atau penyimpangan perilaku agar kondisi korban dapat pulih kembali. Ketiga, ditinjau dari aspek medis yaitu berupa pendampingan apabila korban memerlukan penanganan medis, misalnya seperti luka fisik yang perlu dilakukan pengobatan di rumah sakit ataupun luka secara kejiwaan yang perlu dibawa ke psikiater. Keempat, ditinjau dari aspek sosial yaitu berupa pelaksanaan sosialisasi bilamana di dalam lingkungan tempat tinggal korban diperlukan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap perlindungan anak sehingga muncul



kepedulian apabila ada terjadi bentuk eksploitasi anak dalam lingkungan bermasyarakat.

Pada umumnya, kasus eksploitasi anak yang sering terjadi biasanya diselesaikan melalui jalur non hukum. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku dari kasus eksploitasi anak adalah orang tua dari anak tersebut, sehingga langkah berikutnya adalah memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan juga memberikan pendampingan dari sisi orang tua sebagai pelaku. Berbeda halnya dengan kasus eksploitasi seksual, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum guna memberi efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi hal tersebut.

Orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya secara ekonomi dalam hal ini adalah menjadikan anaknya sebagai pengemis di jalan tentu merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, karena di dalam peraturan perundang-undangan terkait anak khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76I disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan untuk melakukan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yang apabila pasal 76I tersebut dilanggar, maka pasal yang mengatur mengenai sanksi atau hukumannya terletak pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar pasal tersebut akan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis tentulah sebuah tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sebelum meminta pertanggungjawaban pidana haruslah kita menilik unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Apakah orang tua tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa adanya kemampuan bertanggungjawab; adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan; serta tidak adanya alasan pemaaf atau belum. Pertama-tama, kita harus melihat kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kedua, kita harus melihat adakah unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan eksploitasi anak. Ketiga, kita harus melihat adakah alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya atau tidak. Setelah ketiga unsur pertanggungjawaban pidana ini terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah unsur-unsur dari pasal yang dilanggar itu terdapat dalam perbuatannya atau tidak. Unsur-unsur tersebut apabila terpenuhi dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis, maka orang tua tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Kedua unsur tersebut apabila terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan pelaku dalam hal ini adalah orang tua dari anak sendiri, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana di pengadilan.

Di dalam menangani kasus eksploitasi anak pasti ada kendala yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut yaitu terkait dengan pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi dengan cara menempatkan anak tersebut di *shelter* yang mana saat ini masih terbatas dan juga adanya batasan waktu bagi anak untuk dapat ditempatkan di *shelter* tersebut. Pada dasarnya yang perlu dilakukan pada penanganan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi tidak hanya berorientasi pada korban saja tetapi juga pada pelaku eksploitasi anak tersebut. Hal ini dilakukan harapannya supaya penanganan kasus eksploitasi anak tidak perlu melalui jalur hukum, tetapi dengan catatan anak tersebut tidak mendapatkan bentuk eksploitasi lagi dari orang tua maupun orang lain. Tentunya untuk mewujudkan perlindungan bagi anak khususnya korban eksploitasi diperlukan

pendampingan yang berkesinambungan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak tidak hanya berupa sanksi atau hukuman pidana saja. Di luar sanksi tersebut, ada sanksi dalam bentuk rehabilitasi serta pembinaan yang bisa dilakukan di Dinas Sosial seperti Panti Sosial Bina Karya (PSBK) yang mana orang tua tersebut akan diberi keterampilan dan diberdayakan agar dapat mencari penghasilan dan tidak lagi mempergunakan anaknya sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan. Harapannya dengan di rehabilitasi orang tua akan memahami betapa rentannya anak menjadi korban eksploitasi karena kondisi anak tersebut yang masih lemah dan mudah terpengaruh oleh orang lain terutama orang yang lebih tua.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi dan orang tua sebagai pihak yang mengasuh anak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak tersebut. Hak-hak anak dan kewajiban serta tanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak yang mana dilarang oleh hukum.

Aturan yang mengatur larangan beserta dengan sanksi dalam melakukan eksploitasi anak dapat dilihat dalam pasal 76I dan

pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi hanya sebatas pada pemberian rehabilitasi. Pada prakteknya, penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak belumlah sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga Perlindungan Anak melakukan upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, aspek medis, dan aspek sosial.

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan adalah:

Pemerintah, lembaga yang berwenang dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tentang eksploitasi anak dan mengenali tindakan-tindakan yang menjurus pada terjadinya eksploitasi anak, serta perlu meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan rasa peduli terhadap sesama. Aparat penegak hukum seharusnya dapat menerapkan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Orang tua sebagai pihak yang berperan banyak dalam kehidupan anak seharusnya lebih ditingkatkan lagi kesadarannya supaya tidak menjadikan anak sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak seharusnya lebih dipertegas agar memberi efek jera pada pelaku.

## 5. REFERENSI

Dena Kurnia Sari, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengemis Dengan*

*Membawa Bayi/Anak-Anak Di Bawah Umur Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3142. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3177. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.  
Lembaran Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1.  
Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017  
Tentang Standar Operasional Prosedur  
Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.  
Berita Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 37.  
Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/19321651/seorang-ayah-di-makassar-ditangk-karena-jadikan-anaknya-pengemis-ap->, diakses 22 Agustus 2019, pukul 16.57 WIB.